nuonline TERVERIFIKASI oleh Dewan Pers

Nasional

Koalisi Sipil Nilai Putusan PTUN soal Pernyataan Fadli Zon akan Berpotensi Pulihkan Moral Politik di Indonesia

NU Online · Selasa, 7 April 2026 | 21:00 WIB



Marzuki Darusman dalam konferensi pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, di Jakarta, pada Selasa (7/4/2026). (Foto: tangkapan layar Youtube YLBHI)



Haekal Attar
Penulis

Jakarta, ***NU Online***
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas tengah menanti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas gugatan terkait pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Putusan tersebut berpotensi memulihkan moralitas politik di Indonesia.

Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Pemerkosaan Mei 1998, Marzuki Darusman, yang tergabung dalam koalisi, menyampaikan bahwa PTUN Jakarta akan memutus perkara Nomor 303/G/2025/PTUN-JKT pada akhir April 2026.

Gugatan tersebut berkaitan dengan pernyataan Fadli Zon yang menyangkal tragedi pemerkosaan Mei 1998. Pernyataan itu dipersoalkan karena tidak disertai data pendukung yang memadai, baik terkait nama korban, waktu, peristiwa, lokasi kejadian, maupun pelaku.

Baca Juga

Fadli Zon Didesak Minta Maaf Karena Sebut Peristiwa Pemerkosaan Massal Mei 1998 Hanya Rumor

Marzuki menegaskan, putusan PTUN memiliki arti penting dalam konteks kehidupan hukum dan politik nasional. Ia menyebut, putusan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk memulihkan keadaban dalam praktik hukum di Indonesia.

"Kita berada dalam simpang yang menentukan tadi, bahwa mungkin dalam satu beberapa minggu ini akan ada keputusan. Jadi harapan kita ini adalah bahwa PTUN ini adalah pintu masuk ke dalam dunia hukum kita yang serba-serbi," katanya saat jumpa pers di Kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

"Tidak sulit untuk melakukan kesimpulan (Pembacaan oleh Majelis Hakim PTUN), kesulitannya ialah PTUN ini ditekan oleh pemerintah, dan itu terjadi," tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya sikap bertanggung jawab dari Fadli Zon atas pernyataannya yang menyebut tragedi pemerkosaan Mei 1998 sebagai fantasi, khayalan, dan dongeng.

Baca Juga

Penyangkalan Pemerkosaan Mei 1998 Setara dengan Tindakan terhadap Korban

"Dan kedua, meminta maaf secara publik atas kesalahannya itu," katanya.

Marzuki menyatakan bahwa apabila Fadli Zon bersikukuh menyebut peristiwa tersebut sebagai fantasi, maka klaim tersebut juga harus dapat dibuktikan.

"(Tuntutan saat ini) Bisa menjadi pintu masuk memulihkan keadaban dalam kehidupan hukum kita ini, dan kemudian menyatakan bahwa apa yang diucapkan Fadli Zon itu tidak layak dan meminta maaf kepada publik," katanya.

"Ini sedemikian pentingnya PTUN itu (menjaga) kepercayaan bangsa Indonesia terhadap tata hukum ini akan bermula dari ini," sambungnya.

Baca Juga

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Fadli Zon Hentikan Penyangkalan Pemerkosaan Mei 1998

Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas telah melampirkan beberapa petitum, di antaranya:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tindakan administrasi pemerintah yang dilakukan oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah;

3. Mewajibkan tergugat untuk melakukan tindakan menarik tindakan administrasi pemerintah yang dilakukan tergugat berupa pernyataan dalam siaran berita Kementerian Kebudayaan;

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Editor: **Aru Lego Triono**
Penulis: **Haekal Attar**

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!

Gabung Sekarang

Tags

Masyarakat Sipil | Pemerkosaan | 1998

Terpopuler

1. Arab Saudi Bagikan 100 Paket Umroh Gratis, Begini Cara Daftarnya
2. Prabowo Usulkan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai Calon Wapres
3. Prabowo Serahkan Calon Wapres Pengganti Gibran kepada MPR
4. PBNU Jelaskan 7 Mekanisme Pemilihan 33 PCNU untuk Program Khidmah Umat
5. Khutbah Jumat: Jangan Menunggu Masa Tua untuk Bersungguh-sungguh Beribadah
6. Prabowo Sebut Sistem Politik dan Hukum Tetap Berjalan di Tengah Pergantian Wapres

Terkini

Lihat Semua

Nasional

Mukernas II MUI 2026 Tegaskan Transformasi Tata Kelola dan Metode Dakwah

Kamis, 26 November 2026 | 14:00 WIB

Nasional

Muhammad Fajrul Husain Tawarkan Kaderisasi Adaptif dan Inklusif untuk Masa Depan IPNU

Kamis, 26 November 2026 | 13:00 WIB

Nasional

Ahmad Robert Tawarkan Gagasan IPNU Sinergi, Dorong Kader Berdaya dan Berdampak

Kamis, 26 November 2026 | 11:00 WIB

Nasional

Panitia Ad Hoc MPR Usulkan Sidang Paripurna Dua Hari Berturut-turut untuk Pilih Wapres Baru

Kamis, 26 November 2026 | 10:30 WIB

Nasional

Muhammad Rafli Rifki Reza Tawarkan Gagasan IPNU Trendsetter, Bangun Ekosistem Pelajar Tangguh

Kamis, 26 November 2026 | 09:00 WIB